

Babinsa Cileles Monitor Pembangunan Rutilahu Bantuan Kementerian PKP di Jatinangor

Idris. Tukwain - JATINANGOR.JENDERALSANTRI.COM

Aug 16, 2026 - 04:24



Pemilik rumah tidak layak huni (Rutilahu).

SUMEDANG – Babinsa Desa Cileles, Serda Idris Tukwain, melaksanakan monitoring pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Dusun Narontong RT 04/RW 10, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang,

Jawa Barat, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan rumah berjalan dengan baik dan sesuai peruntukannya. Monitoring juga menjadi bagian dari pendampingan Babinsa terhadap warga di wilayah binaannya.

Dalam kegiatan tersebut, Serda Idris Tukwain bertemu dengan Aceng dan Aat selaku penerima bantuan Rutilahu. Turut hadir pula Dudi. Selain memantau perkembangan pembangunan, Babinsa juga bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan pemilik rumah mengenai proses pengerjaan yang sedang berlangsung.

Aceng dan Aat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan Babinsa selama proses pembangunan rumah mereka.

“Terima kasih kepada Babinsa yang sudah meluangkan waktu untuk mengontrol proses pembangunan Rutilahu sekaligus bersilaturahmi dengan kami sebagai warga binaannya. Kehadiran Babinsa tentu menjadi motivasi bagi kami,” ujar Aceng.

Sementara itu, Serda Idris Tukwain mengatakan bahwa monitoring tersebut merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam mendukung dan mengawal program pemerintah agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Program Rutilahu ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Kami sebagai Babinsa akan terus melakukan pendampingan dan monitoring agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” kata Serda Idris.

Ia berharap pembangunan rumah tersebut dapat berjalan lancar sehingga segera dapat ditempati dengan kondisi yang lebih layak dan nyaman.

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan mengedepankan semangat swadaya, gotong royong, serta partisipasi masyarakat. Selain memperbaiki kualitas hunian, kegiatan tersebut diharapkan turut memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. ([PERS](#))